KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI TEKNIS
Penyedia jasa lainnya (*Event Organizer*) paket pekerjaan : *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENDAMPINGAN DESA dan FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pendahuluan

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A merupakan bagian P3PD secara keseluruhan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan tata kelola pendampingan desa. P3PD dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT melalui dukungan pembiayaan pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program tersebut hakikatnya adalah untuk mendukung peningkatan kualitas belanja desa melalui pendampingan yang berkualitas. Pendampingan dititikberatkan pada upaya fasilitasi dan pendampingan pada pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bersama Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 Kementerian Desa dan PDT melaksanakan pendampingan melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari pusat hingga desa. Elemen TPP yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah Tenaga Pendamping Profesional. Sehingga, kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dimaksud, akan sangat menentukan keberhasilan kerja-kerja pendampingan. P3PD Sub Komponen 2A dikelola oleh Pusat PPMDDT pada BPSDM PMDDT Kementerian Desa Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai Project Management Unit (PIU). Pengelolaan P3PD Sub Komponen 2A tidak dapat dipisahkan dari Sub Komponen lain P3PD yang tersebar pada beberapa unit kerjadi internal Kementerian Desa dan PDT. Untuk itu koordinasi lintas unit kerja atau lintas PIU maupun dengan kementerian/lembaga terkait lain sangat dibutuhkan, dalam rangka penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa melalui dukungan P3PD secara keseluruhan.

Dalam rangka pencapaian output Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A, Pusat PPMDDT pada BPSDM PMDDT selaku Project Management Unit (PIU) P3PD, menyelanggarakan bermaksud kegiatan *event organizer* yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa non konsultan. Proses pengadaan dari kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan dengan Bank Dunia sebagaimana yang tercantum dalam naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri *IBRD Loan no. 8941-ID Institutional Strengthening for Improve Village Services Delivery Project.*

2. Tujuan Pekerjaan Jasa Event Organizer

Tujuan pekerjaan jasa event organizer adalah membantu satuan kerja Pusat PPMDDT pada BPSDM PMDDT sebagai Project Management Unit (PIU) sub komponen 2A, untuk melaksanakan kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yaitu: FOCUS GROUB DISCUSSION PENDAMPINGAN DESA dan FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF. maksud dan tujuan serta Spesifikasi Teknis dari kegiatan tersebut terdapat pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka acuan ini.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Secara umum *Event Organizer* harus melaksanakan seluruh kegiatan dengan ruang lingkup kegiatan secara umum sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan beserta akomodasi dan konsumsi paket fullboard meeting, dengan ketentuan hotel minimal bintang IV atau setara
2. Menyediakan honor narasumber dan pengajar sesuai kondisi rill kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Merekam profil peserta, tenaga pengajar, dan narasumber/penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital;
4. Menyediakan bahan-bahan kegiatan yang meliputi : Backdrop, Alat Tulis Kantor dan Seminar Kit serta Dokumentasi Pelatihan, serta kebutuhan perlengkapan atau bahan lainnya untuk kelancaran pelatihan; (Adapun rincian dan spesifikasi bahan-bahan kegiatan terlampir pada lampiran dokumen ini)
5. Menyediakan akomodasi dan konsumsi narasumber, Pengajar dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku pada paket kegiatan fullboard meeting;
6. Menyediakan uang harian peserta offline dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
7. Menyediakan biaya transportasi narasumber, Pengajar dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyediakan kebutuhan lain selama pelaksanaan pelatihan dengan berpedoman pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam kontrak kerja Perusahaan EO;
9. Laporan penyelenggaraan acara yang berisi laporan seluruh rangkaian pelaksanaan acara (proceeding) yang dilengkapi foto, video dokumentasi kegiatan setiap Kegiatan, invoice, hasil dan rekomendasinya, serta laporan keuangan yang telah terverifikasi oleh PPK terkait penyelenggaraan acara
10. Melampirkan rincian rencana kerja yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dimulai dari penandatangan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan; 11.Seluruh pembayaran ke hotel wajib menggunakan sistem transfer dan dilunasi sebelum batas akhir serah terima hasil pekerjaan.

4. Manajemen *Event Organizer*

Manajemen *event organizer* dalam mengelola kegiatan P3PD disyaratkan memiliki kompetensi dan dukungan manajemen sebagai berikut:

1. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
2. Memiliki NPWP serta status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
3. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan Pemerintah melaksanakan kegiatan *event organizer* dengan sumber anggaran pinjaman luar negeri.
4. Mampu menyediakan tenaga teknis selaku dukungan manajemen sebanyak 4 (empat) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
   A. Team Leader / Koordinator (1 orang) : Pendidikan S2 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Team Leader / Koordinator dalam pengorganisasian *event* pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD **minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024** di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP, memiliki sertifikat MICE Marketing Communication dan MICE Venue Management;

B. Liaison Officer (2 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Liaison Officer dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/ FGD **minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024** di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Liaison Officer dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku.;

C. Event Registration (2 orang) :Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai Event Registration dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD **minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024** di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Registration dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;

D. Event Logistic (2 orang): Pendidikan S1 segala jurusan,memiliki pengalaman sebagai Event Logistic dalam pengorganisasian event pada bidang Workshop/Pelatihan/FGD **minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024** di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE Event Logistic dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku.

5. Jangka Waktu Penugasan

Pelaksanaan penugasan untuk melaksanakan kegiatan *Event Organizer* yang tercantum dalam lampiran dokumen ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya kontrak penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat PPMDDT pada BPSDM PMDDT Kemendes PDT.

Time line kegiatan sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA

NO	KEGIATAN	WAKTU			
		BULAN KE - 1			
		MG I	MG II	MG III	MG IV
1	FGD Pendampingan Desa				
2	Fasilitasi Pemuda Pelopor di tingkat Inklusif				

6. Kontrak dan Termin Pembayaran

Kontrak akan ditandatangani selama 1 (satu) bulan setelah penetapan pemenang dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kinerja *event organizer* dengan mengacu pada ketentuan perundangan dan perjanjian *Loan Agreement IBRD Loan no, 8941-ID Institutional Strengthening for Improve Village Services Delivery Project*.

Pembayaran akan dilakukan secara sekaligus setelah selesainya kegiatan sesuai dengan kontrak dan output dan hasil keluaran yang tercantum pada kerangka acuan kegiatan yang terlampir pada dokumen ini.

Jakarta, Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) – I PPMD



Andhika Sampurno, SE, MM
NIP. 19900805 201903 1 005

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI TEKNIS
FOCUS GROUP DISCUSSION PENDAMPINGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

Kementerian Negara	:	Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Unit Eselon I	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
Unit Eselon II	:	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DaerahTertinggal
Program	:	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
Sasaran	:	**Meningkatkanya kualitas belanja Desa**
Kegiatan	:	*Focus Group Discussion* (FGD) Pendampingan Desa
Indikator	:	**1. Terselenggaranya kegiatan Forum Grup Diskusi Pendampingan Desa terkait Desa Berketahanan Iklim, Ketahanan Pangan di Desa, Pembangunan Berkelanjutan di Desa** **2. Tersedianya Rencana Aksi Daerah berdasarkan kebutuhan spesifik desa rentan iklim dan pangan**
Hasil	:	Terlaksananya *Focus Group Discussion* Pendampingan Desa Berketahanan Iklim.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Dokumen
Volume Keluaran	:	Laporan

DAFTAR ISI

1. BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.4 Rencana Anggaran Biaya

2. BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

2.2 Keluaran Kegiatan

2.3 Pelaporan

2.4 Jadwal Pekerjaan

3. BAGIAN 3 : METODE PENGADAAN

3.1 Mekanisme Pengadaan

4. BAGIAN 4 : PENUTUP

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A merupakan bagian P3PD secara keseluruhan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan tata kelola pendampingan desa. P3PD dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT melalui dukungan pembiayaan pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program tersebut hakikatnya adalah untuk mendukung peningkatan kualitas belanja desa melalui pendampingan yang berkualitas. Pendampingan dititikberatkan pada upaya fasilitasi dan pendampingan pada pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bersama Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melaksanakan pendampingan melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari pusat hingga desa. Elemen TPP yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah Tenaga Pendamping Profesional. Sehingga, kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dimaksud, akan sangat menentukan keberhasilan kerja-kerja pendampingan.
P3PD Sub Komponen 2A dikelola oleh Pusat PPMDDTT pada BPSDM PMDDTT sebagai Project Management Unit (PIU). Pengelolaan P3PD Sub Komponen 2A tidak dapat dipisahkan dari Sub Komponen lain P3PD yang tersebar pada beberapa unit kerjadi internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Untuk itu koordinasi lintas unit kerja atau lintas PIU maupun dengan kementerian/lembaga terkait lain sangat dibutuhkan, dalam rangka penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa melalui dukungan P3PD secara keseluruhan.

1. Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang dampaknya dirasakan hingga ke tingkat lokal, terutama di wilayah pedesaan Indonesia. Fenomena seperti kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta abrasi pesisir semakin memperburuk kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat desa. Desa-desa di Indonesia, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lokal, menjadi kelompok paling rentan menghadapi ancaman ini.
2. Berdasarkan data *Indeks Risiko Iklim Desa* (IRID), banyak wilayah desa di Indonesia berada dalam kategori risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini mencerminkan urgensi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat. Apabila tidak ditangani secara sistematis, kerentanan ini dapat mengancam ketahanan pangan, mengurangi pendapatan masyarakat desa, dan memperburuk tingkat kemiskinan.
3. Program *Desa Berketahanan Iklim* adalah salah satu upaya strategis untuk membantu desa-desa di Indonesia mengatasi tantangan perubahan iklim. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan desa melalui pendekatan mitigasi dan adaptasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan desa. Program ini memerlukan sinergi lintas sektor dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, dan desa.

4. Desa Berketahanan Iklim memiliki konsekwensi pada ketahanan pangan di desa serta pembangunan berkelanjutan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Melalui kegiatan ini, diharapkan desa-desa di wilayah rentan dapat lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim, meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi, berketahanan pangan serta implementassi pembangunan berkelanjutan, dan diharapkan desa dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga dianggap perlu oleh PIU Sub Komponen 2A untuk menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah (Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan dan Gizi
8. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2023 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.5 Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat.

1.3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam melakukan pendampingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pendampingan desa dalam menghadapi perubahan iklim, mendorong ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan melalui penyelarasan kebijakan, strategi, dan program berbasis data kerentanan iklim, secara khusus tujuan kegiatan ini meliputi:

1. Mengidentifikasi masalah dan potensi yang dihadapi desa-desa rentan iklim di wilayah peserta FGD.
2. Menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah dalam mendukung Desa Berketahanan Iklim, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjuan di Desa
3. Merumuskan strategi pendampingan yang kontekstual dan berbasis Indeks Risiko Iklim Desa (IRID).
4. Membangun jejaring kerja lintas sektor untuk mendukung implementasi program secara berkelanjutan.

5. Mendapatkan praktek baik peran pendamping dalam penanganan perubahan iklim di desa
6. Menyusun rencana aksi daerah dalam implementasi pendampingan desa berketahanan iklim.

b. Sasaran
   1. Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) berasal dari pusat dan provinsi yang memiliki akses dalam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat, meliputi:
      a. ASN dilingkungan BPSDMPMDDT Kemendesa dan PDT, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kemendagri;
      b. Tenaga Pendamping Profesional Pusat;
      c. Tenaga Ahli P3PD;
      d. Pengelola P3PD 2A;
      e. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) provinsi;
      f. Lembaga atau Mitra terkait, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil serta NGO (Non Government Organization) yang fokus pada isu perubahan iklim.

   2. Wilayah Sasaran
      Provinsi-provinsi yang tercatat memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim berdasarkan IRID, dan Ketahanan Pangan yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

c. Materi
   Substansi materi yang akan menjadi bahan diskusi di FGD meliputi Desa Berketahanan Iklim, Desa Berketahanan Pangan, Pembangunan Desa Berkelanjutan.

1.4. Rencana Anggaran Biaya

Pembiayaan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendampingan Desa berasal dari DIPA BPSDM PMDDT Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Loan IBRD 8941-ID.

BAGIAN 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan adalah BPSDM PMDDT melalui Pusat PPMDDT selaku PIU P3PD Sub Komponen 2A. Mekanisme pengelolaan kegiatan dan pembiayaan dilakukan melalui EO (Event Organizer) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dari Bank Dunia.

A. Narasumber

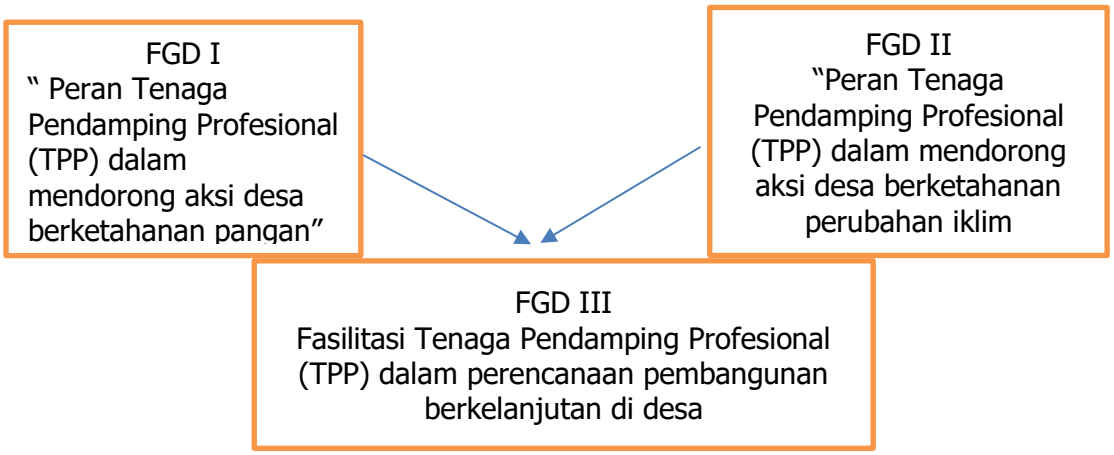
Narasumber kegiatan adalah Pakar/Ahli/Praktisi, serta Kementerian/ Lembaga terkait Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan serta unsur lainnya yang relevan dengan pelaksanaan P3PD. Pakar/Ahli/Praktisi adalah orang yang memiliki kapasitas serta pengetahuan serta pengalaman di bidang sesuai yang dibutuhkan pada tema kegiatan masing FGD.

B. Peserta

Peserta kegiatan Focus Group Discusion melibatkan peserta sebanyak 92 orang yang berasal dari Unsur-unsur :

1. Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Bappenas;
7. Kemendagri;
8. World Bank;
9. Unit Kerja Eselon I dan II Pelaksana P3PD Kementerian Desa dan PDT;
10. Tenaga Ahli P3PD;
11. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat;
12. Tenaga pelaksana P3PD Sub Komponen 2A.
13. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi;
14. NGO / Organisasi Masyarakat Sipil /Komunitas

FGD dilaksanakan 3 kali dengan pembahasan :
FGD I Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa berketahanan pangan;
FGD II Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa dalam berketahan perubahan iklim
FGD III Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di desa.
Output FGD I dan II menjadi rekomendasi dalam pembahasan FGD III Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di desa.



C. Agenda Kegiatan

1. FGD I Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa berketahanan pangan;

Hari/Waktu	Agenda/Materi	Penanggung Jawab
I		
14.00-16.00	Checkin peserta	EO
17.00-18.00	Penjelasan Teknis	TA P3PD dan EO
19.30-21.00	Pembukaan	Kepala P3MD
II 08.00-10.00	Paparan Narasumber I "Exit Strategi P3PD dalam Pengakhiran Program 2025"	Eselon II Kemendagri
10.00-10.15	Cofee Break	EO
10.15-12.15	Paparan Narasumber II "Evaluasi P3PD "	Bappenas
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Paparan Narasumber III "Peningkatan Produktifitas Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan" Paparan Narasumber IV "Sektor perikanan dalam pemenuhun kebutuhan potein hewani masyarakat dan kontribusi dalam ketahan pangan masyarakat"	Eselon II Kementerian Pertanian Eselon II Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan Narasumber V, VI, VII	
	"Strategi dan Sosialisasi Diversivikasi Produk olahan dalam mendukung ketahanan pangan"	Pakar Ahli Olahan Pangan, Pakar Ahli Gizi dan Pakar Komunikasi
III 08.00-10.00	"Kebijakan strategis Tenaga Pendamping Profesional dalam mendukung Aksi Desa untuk Mndukung Ketahanan Pangan"	Kepala P3MD
10.00-10.30	Cofee Break dan Pembentukan Kelompok (5 kelompok) : Kelompok I, Petani dan Nelayan	TA P3PD dan EO

	"Tantangan yang dihadapi Petani dan Nelayan dalam meningkatkan produktifitas pangan" Kelompok II, Pemerintah desa " kebijakan dan Program Desa yang mendukung ketahanan pangan" Kelompok III, Tokoh Masyarakat "Peran Masyarakat dalam mendukung Ketahanan Pangan" Kelompok IV, Akademisi/Ahli "Pengetahuan dan Teknologi sebagai dukungan terhadap Ketahanan pangan' Kelompok VI, Pendamping "Peran Pendamping dalam membantu Petani/nelayan, fasilitasi pemerintah Desa, mobilisasi dan meyebarluaskan usaha ketahanan pangan	
10.15-12.15	Diskusi kelompok :	Ketua Kelompok
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Diskusi kelompok	Ketua Kelompok
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan masing masing Kelompok	
IV		
08.00-10.00	Penutupan	
10-00-12.00	Penyelesaian Adminitrasi peserta Peserta Check Out	EO
14.00-18.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
V		
08.00-10.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
10.00-12.00	Penyelesaian adminitrasi Tim Perumus dan Check Out	EO

2. FGD II, Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa dalam berketahan perubahan iklim

Hari/Waktu	Agenda/Materi	Penanggung Jawab
I		
14.00-16.00	Checkin peserta	EO
17.00-18.00	Penjelasan Teknis	TA P3PD dan EO
19.30-21.00	Pembukaan	Kepala P3MD
II 08.00-10.00	Paparan Narasumber I "Anomali perubahan Iklim Global dan lokal serta dampaknya diberbagai sektor"	Eselon II Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10.00-10.15	Cofee Break	EO
10.15-12.15	Paparan Narasumber II	Eselon II, Badan

	"Penanggulangan Bencana Alam terkait Perubahan Iklim "	Nasional Penanggulangan Bencana
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Paparan Narasumber III dan IV "Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Perikanan dalam ditengah Perubahan Iklim	Eselon II Kementerian Pertanian Eselon II Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan Narasumber V, VI, VII	
	"Mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan Iklim"	Pakar Ahli Lingkungan, Pakar Ahli Iklim dan Meteorologi serta Pakar Ahli Teknologi dan Inovasi
III 08.00-10.00	"Kebijakan strategis Tenaga Pendamping Profesional dalam mendukung Aksi Desa untuk Mendukung Pengelolaan perubahan Iklim"	Kepala P3MD
10.00-10.30	Cofee Break dan Pembentukan Kelompok (5 kelompok) : Kelompok I, Petani dan Nelayan "Tantangan yang dihadapi Petani dan Nelayan dalam Perubahan Iklim " Kelompok II, Pemerintah desa " kebijakan dan Program Desa yang mendukung Ketahanan Perubahan Iklim" Kelompok III, Tokoh Masyarakat "Peran Masyarakat dalam mendukung pengelolaan perubahan iklim" Kelompok IV, Akademisi/Ahli "Pengetahuan dan Teknologi sebagai dukungan terhadap Pengelolaan Perubahan Iklim' Kelompok V, Pendamping "Peran Pendamping dalam membantu Petani/nelayan, fasilitasi pemerintah Desa, mobilisasi dan meyebarluaskan usaha pengelolaan perubahan.	TA P3PD dan EO
10.15-12.15	Diskusi kelompok :	Ketua Kelompok
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Diskusi kelompok	Ketua Kelompok
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan masing masing Kelompok	

IV		
08.00-10.00	Penutupan	
10-00-12.00	Penyelesaian Adminitrasi peserta Peserta Check Out	EO
14.00-18.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
V		
08.00-10.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
10.00-12.00	Penyelesaian adminitrasi Tim Perumus dan Check Out	EO

3. FGD III, Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di desa

Hari/Waktu	Agenda/Materi	Penanggung Jawab
I		
14.00-16.00	Checkin peserta	EO
17.00-18.00	Penjelasan Teknis	TA P3PD dan EO
19.30-21.00	Pembukaan	Kepala P3MD
II 08.00-10.00	Paparan Narasumber I "Dukungan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Berkelanjutan"	Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup
10.00-10.15	Cofee Break	EO
10.15-12.15	Paparan Narasumber II "Dasar- Dasar Pembangunan Berkelanjutan "	Eselon II Bappenas
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Paparan Narasumber III "Usaha Pertanian dan perikanan ramah lingkungan dalam upaya menjaga keberlanjutan"	Eselon II Kementerian Pertanian Eselon II Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan Narasumber V, VI, VII	
	"Strategi Ekonomi, Sosial dan Pengelolaan Lingkungan dalam usaha pembangunan berkelanjutan "	Pakar Ahli Ekonomi, Sosial dan Pakar Ahli Lingkungan
III 08.00-10.00	"Kebijakan strategis Tenaga Pendamping Profesional dalam mendukung Aksi Desa untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan"	Kepala P3MD
10.00-10.30	Cofee Break dan Pembentukan Kelompok (5 kelompok) : Kelompok I, Petani dan Nelayan "Tantangan yang dihadapi Petani dan Nelayan dalam meningkatkan	TA P3PD dan EO

	produktifitas pangan berkelanjutan" Kelompok II, Pemerintah desa " kebijakan dan Program Desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan" Kelompok III, Tokoh Masyarakat "Peran Masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan" Kelompok IV, Akademisi/Ahli dukungan terhadap keberlngsungn pembangunan yang ramah lingkungan' Kelompok VI, Pendamping "Peran Pendamping dalam membantu Petani/nelayan, fasilitasi pemerintah Desa, mobilisasi dan meyebarluaskan usaha Pembangunan Desa yag berkelanjutan/Ramah Lingkungan	
10.15-12.15	Diskusi kelompok :	Ketua Kelompok
12.15-13.30	Isoma	
13.30-15.30	Diskusi kelompok	Ketua Kelompok
15.30-16.00	Cofee Break	EO
16.00-18.00	Paparan masing masing Kelompok	
IV		
08.00-10.00	Penutupan	
10-00-12.00	Penyelesaian Adminitrasi peserta Peserta Check Out	EO
14.00-18.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
V		
08.00-10.00	Penyusunan rekomendasi hasil FGD oleh Tim Perumus	Tim Perumus
10.00-12.00	Penyelesaian adminitrasi Tim Perumus dan Check Out	EO

1.2 KELUARAN KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pendampingan desa berketahanan iklim, Ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan mencakup:

a. Rekomendasi kebijakan di pusat, daerah dan desa berdasarkan kewenangan masing-masing, berupa kertas kebijakan yang mendorong regulasi, peraturan, surat penetapan/keputusan secara berjenjang untuk implementasi *Desa Berketahanan Iklim, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan*;
b. Rencana aksi daerah berdasarkan kebutuhan spesifik desa rentan iklim;
c. Kesepakatan bersama tentang langkah strategis pendampingan desa;
d. Peserta memahami konsep, strategi, dan kebijakan terkait Desa Berketahanan Iklim*;*
e. Mendorong praktik baik untuk knowledge sharing dan pembelajaran di desa-desa
f. Peserta mampu mengidentifikasi masalah dan potensi di wilayah masing-masing.

1.3 PELAPORAN

Pelaporan dari kegiatan/pekerjaan Laporan disusun dalam Bahasa Indonesia dan digandakan dalam 5 eksemplar.

1.4 JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan FGD akan dilaksanakan 3 kali masing masing selama 3 hari Fullboard (3 malam menginap) khusus untuk Tim Perumus ditambah 1 hari, dengan masa pelaksanaan selama 30 hari kalender atau 1 (satu) Bulan dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan di Jakarta dan time line kegiatan sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENDAMPINGAN DESA

NO	TAHAPAN	WAKTU			
		Bulan ke -1			
		MG I	MG II	MG III	MG IV
1	Persiapan Kegiatan				
2	Pelaksanaan Kegiatan FGD I				
3	Pelaksanaan Kegiatan FGD II				
4	Pelaksanaan Kegiatan FGD III				
6	Pelaporan				
7	Pembayaran				

BAGIAN 3 METODE PENGADAAN

3.1. MEKANISME PENGADAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tatap muka langsung, dengan metode pelaksanaan adalah ceramah dari narasumber yang berkompeten dan diskusi terarah yang dipandu secara berjenjang dari peserta Focus Group Discusion (FGD), dengan didukung penggunaan media digital dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan dan Penanggung jawab kegiatan adalah Pusat PPMDDT dan pengelolaan kegiatan serta pembiayaan akan dilaksanakan melalui pihak ketiga, yaitu Perusahaan Event Organizer (EO). Proses pengadaan pemilihan penyedia Jasa lainnya dengan metode pada procurment in invesment Project Financing (IPF) Goods, Works, an Non- Consulting Services dari World bank (Bank Dunia)

BAGIAN 4 PENUTUP

Spesifikasi Teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendampingan Desa Berketahanan Iklim, P3PD Sub Komponen 2A Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan dimaksud, maka Spesifikasi Teknis ini akan direvisi dan dikoordinasikan kembali dengan Bank Dunia.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kerangka acuan dan bersifat teknis, akan dikoordinasikan kemudian dan diatur melalui kebijakan BPSDM PMDDTT khususnya melalui Pusat PPMDDT.

Jakarta, Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I
PPPMD



Andhika Sampurno, SE, MM
NIP. 19900805 201903 1 005

Daftar Belanja Bahan Pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2025

NO	BAHAN	VOLUME	SATUAN
I	ALAT TULIS KANTOR		
1.	Amplop (110 x 230)	3	Dus
2.	Stapler Kecil	3	Unit
3.	Binder Clip (51 mm dan 41 mm)	3	Pak
4.	Paper Clip	3	Pak
5.	Kertas A4	3	Rim
6.	Kertas F4	3	Rim
II	Seminar Kit	276	PKT
III	ID Card + Lanyard	276	Pkt
IV	Backdrop Menyesuaikan ukuran dengan tempat pelaksanaan	3	PKT
V	Dokumentasi Berupa Hardisk Eksternal WD My Passport	3	Unit

SPESIFIKASI TEKNIS

FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

Nama Program	:	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2A
Nama Kegiatan	:	Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Menumbuhkembangkan kaderisasi melalui kreatifitas dan Inovasi Pemuda dalam membangun Desa
Jenis Keluaran (*Output*)	:	1. Rencana Aksi untuk pengembangan program inklusif di Desa; 2. Pembentukan Jaringan antar Pemuda Pelopor untuk saling berbagi pengalaman dan Dukungan; 3. Meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya insklusi social di Desa; 4. Meningkatkan kapaitas pemuda di desa sebagai agen pembaharu Desa 5. Memberdayakan pemuda untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang inklusif 6. Mendorong kaderisasi dan kolaborasi peran pemuda, masyarakat dan pemerintah Desa.
Volume Keluaran	:	1 Dokumen/Paket Kegiatan
Anggaran	:	Rp 6.863.416.000,- (Enam Milyar Delapan ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 2A merupakan bagian P3PD secara keseluruhan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan tata kelola pendampingan desa. P3PD dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT melalui dukungan pembiayaan pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program tersebut hakikatnya adalah untuk mendukung peningkatan kualitas belanja desa melalui pendampingan yang berkualitas. Pendampingan dititikberatkan pada upaya fasilitasi dan pendampingan pada pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bersama Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Pemberdayaan masarakat Desa dimaknai sebagai proses penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebuah proses pembentukan Desa sebagai kekuatan sosial-politik yang digerakkan bersama-sama oleh pemimpin dan warga desa. Kata kunci dari keberlanjutan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ditentukan oleh adanya kerja sama pemimpin Desa dan masyarakat Desa dalam menyelenggarakan Desa berdasarkan asas pengaturan Desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Sejak tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melaksanakan pendampingan melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari pusat hingga desa. Elemen TPP berinteraksi langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah Tenaga Pendamping Profesional. Sehingga, kapasitas Tenaga Pendamping Profesional sangat menentukan keberhasilan kerja-kerja Pendampingan dalam pemberdayaan. Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat Desa adalah mendorong pemuda sebagai dinamisator Desa, sekaligus sebagai agen pembaharu desa melalui proses pembelajaran masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas dirinya sebagai Pelopor Pembangunan Desa, sesuai 12 rencana aksi Kementeria Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada poin 6 yaitu Pemuda sebagai Pelopor Perubahan.

P3PD Sub Komponen 2A dikelola oleh Pusat PPMDDT pada BPSDM PMDDT sebagai Project Management Unit (PIU). Pengelolaan P3PD Sub Komponen 2A tidak dapat dipisahkan dari Sub Komponen lain P3PD yang tersebar pada beberapa unit kerja di internal Kementerian Desa, dan PDT.

Untuk itu koordinasi lintas unit kerja atau lintas PIU maupun dengan kementerian/lembaga terkait lain sangat dibutuhkan, dalam rangka penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa melalui dukungan P3PD secara keseluruhan.

Salah satu Asta Cita keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan baik dari sisi infrastrutur maupun peningkatan sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pelibatan pemuda dalam pembangunan Desa, untuk membantu menganalisis kondisi, masalah, dan potensi yang ada di desa. Selain itu, pemuda dapat aktif meyuarakan isu-isu publik di desa seperti pelayanan, akuntabilitas keuangan, transparansi, partisipasi, dan pembangunan yang inklusif, serta mendorong upaya Desa Berketahanan Iklim, Desa Berketahan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan. Peran Pemuda menjadi pelopor pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga diperlukan kepeloporan Pemuda dalam pembangunan desa terutama terkait isu strategis yaitu berketahanan iklim, ketahanan pangan dan pembangunan Desa Berkelanjutan. Peran pemuda diharapkan menjadi pelopor menggerakkan desa dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Implementasi P3PD menginjak tahun terakhir proyek pada tahun 2025 dimana Project Closing Date akan jatuh pada Juni 2025. Sebagai PIU Sub Komponen 2A Pusat PPMDDT pada BPSDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud khususnya terkait Kepeloporan Pemuda di Desa dengan tema peningkatan spirit perubahan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77;
c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
h. *Loan Agreement 8941-ID* yang berisi tentang *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project*.

1.3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Pemuda yang berusia antara 18–30 tahun.
2. Aktivis muda, pelajar, mahasiswa, atau individu yang memiliki minat dalam pengembangan kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Organisasi pemuda, kelompok diskusi, dan komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan, serta isu actual tentang menghadapi perubahan iklim, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

1.4. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pemuda tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai agen perubahan di masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Meningkatkan kapasitas pemuda baik keterampilan kepemimpinan dan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks sosial dan ekonomi, serta pembangunan di desa.
3. Mendorong pemuda untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di lingkungan sekitar mereka dan menginisiasi proyek atau program Desa Berketahanan Iklim, Desa Berketahanan Pangan, dan Pembangunan Desa Berkelanjutan.
4. Mendorong Kaderisasi Pembangunan di Desa melalui Pendampingan
5. Memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran ide antara pemuda berbasis teknologi digital

1.5. OUTPUT

1. Rencana Aksi untuk pengembangan program inklusif terkait isu strategis di Desa;
2. Pembentukan Jaringan antar Pemuda Pelopor untuk saling berbagi pengalaman dan Dukungan;
3. Peningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya insklusi sosial di Desa;
4. Peningkatan kapasitas pemuda sebagai agen pembaharu di desa.
5. Memberdayakan pemuda untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang inklusif
6. Mendorong kaderisasi dan kolaborasi melalui peran pemuda, masyarakat dan pemerintah Desa;

1.6. OUTCOME

Outcome dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Tata Kelola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Desa yang Inklusif melalui keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan di desa;
2. Penguatan Kaderisasi melalui peran pendampingan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat khususnya pemuda dalam pembangunan desa
4. Tersedianya RKPDes dan APBDes yang inklusif.

1.7. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan ini berasal dari DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 6.863.416.000,-** (Enam Milyar Delapan ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan rincian RAB terlampir. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Loan Number 8941-ID Bank Dunia Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) untuk PIU Pusat PPMDDT pada BPSDM.

BAGIAN 2
RUANG LINGKUP

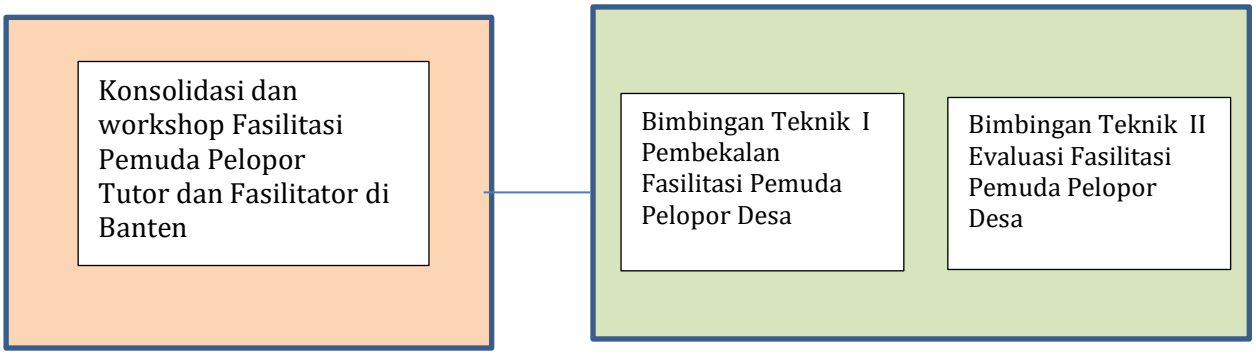
2.1. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Pemuda Pelopor di tingkat Desa Inklusif, Pemuda merupakan agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam memajukan masyarakat dan negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk itu, penting untuk memberikan fasilitas dan ruang bagi pemuda untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan desa terutama terhadap perkembangan kekinian sepeti literasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda sebagai calon pemimpin masa depan yang mampu menjadi pelopor dalam berbagai sektor, melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang relevan dengan tantangan zaman serta untuk mendorong spirit pemuda dalam menumbuh kembangkan kreatifitas dan Inovasi.

2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelakanaan kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor Desa Inklusif dilaksanakan berdasarkan skema kegiatan berikut ini :



1. Kegiatan Konsolidasi Tutor dan Fasilitator merupakan workshop perencanaan membahas dan melakukan konsolidasi materi pemuda pelopor desa dan menyusun tindaklanjut (tutor meliputi TAPM Pusat, TA P3PD, Penggiat Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), TA Kemendesa)
2. Kegiatan konsolidasi fasilitator dan mentor merupakan konsolidasi materi dan rencana persiapan bimbingan Teknik dapat dilakukan diwilayah bimtek (Propinsi/Kabupaten) lokasi pilot yang dilakukan melalui skema pembiayaan lainnya (APBD Kab/prop dan/atau mandiri) berdasarkan surat edaran.
3. Kegiatan Bimbingan Teknik I merupakan pembekalan inclass dan dilanjutkan praktik yang dipandu PD-PLD sebagai Mentor yang disupervisi oleh Fasilitator (TAPM Kab/Propinsi)

4. Kegiatan Bimbingan Teknik II merupakan Evaluasi hasil praktik lapangan Pemuda Pelopor yang didampingi mentor, instrument evaluasi bisa dilakukan melalui google form untuk melakukan evaluasi hasil praktik lapangan dan tindak lanjutnya.
5. Kotak Orange pembiayaan P3PD sedang Kotak Hijau pembiayaan sumber lainnya dan/atau pembiayaan mandiri di Kab/Kota wilayah Pendampingan melalui Surat Edaran.

FASILITASI PEMUDA PELOPOR DESA INKLUSI

Kegiatan Fasilitasi pemuda pelopor desa inkusif dilaksanakan melalui tahapan detail sebagai berikut :

1. **Workshop (Fullboard) Konsolidasi kegiatan fasilitasi pemuda pelopor Desa Inklusi :**

   a. Tujuan workshop konsolidasi melakukan perencanaan dan konsolidasi terhadap materi workshop fasilitasi pemuda pelopor desa dan rencana tindak-lanjut;

   b. Peserta Workshop konsolidasi **20 orang**;

   c. Peserta Workshop konsolidasi antara lain terdiri dari unsur tenaga profesional terkait Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Pusat), TA P3PD, ASN Pusat atau Tenaga Ahli di Kementerian Desa dan PDT, dan yang akan menjadi Tutor Kegiatan fasilitasi Pemuda Pelopor Desa;

   d. Materi kegiatan adalah materi pelopor desa, perubahan iklim, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan

   e. Output Workshop adalah rancangan materi workshop fasiltasi pemuda pelopor Desa dan Rencana Kerja Tindak Lanjut;

   f. Lokasi kegiatan workshop fulllboard 1 (satu) hari di Banten

2. **Workshop Fasilitasi Pemuda Pelopor di Desa Inklusi :**

   a. Tujuan workshop melakukan Konsolidasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Peserta Workshop **734 orang diluar Eselon I dan II (3 orang) terdiri dari**;
      1). Eselon I dan II 3 orang
      2). Peserta pusat 135 orang
      3). Peserta Daerah 596 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Provinsi	Peserta							
		Dinas PMD Provinsi	Dinas PMD Kabupaten	Dinas sosial Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kab	TA Provinsi	TA Kab/ Kota	Pemuda Pelopor	Total
1	Aceh	1	1	1	1	2	5	10	21
2	Sumatera Utara	1	1	1	1	2	5	10	21
3	Sumatera Barat	1	1	1	1	2	4	7	17
4	Riau	1	1	1	1	2	4	7	17
5	Kepulauan Riau	1	1	1	1	2	3	4	13
6	Jambi	1	1	1	1	2	3	7	16
7	Sumatera Selatan	1	1	1	1	2	4	9	19
8	Bangka Belitung	1	1	1	1	2	3	7	16
9	Bengkulu	1	1	1	1	2	3	7	16
10	Lampung	1	1	1	1	2	4	7	17
11	Banten	1	1	1	1	2	4	4	14
12	Jawa Barat	1	1	1	1	2	9	9	24
13	Jawa Tengah	1	1	1	1	2	12	12	30
14	D.I Yogyakarta	1	1	1	1	2	4	4	14
15	Jawa Timur	1	1	1	1	2	12	12	30
16	Bali	1	1	1	1	2	4	7	17
17	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	2	3	7	16
18	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	2	4	7	17
19	Kalimanatan Barat	1	1	1	1	2	3	7	16
20	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	2	3	7	16
21	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	2	3	7	16
22	Kalimantan Timur	1	1	1	1	2	3	7	16
23	Kalimantan Utara	1	1	1	1	2	3	7	16
24	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	2	5	10	21
25	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	2	4	7	17
26	Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	2	4	7	17
27	Sulawesi Barat	1	1	1	1	2	3	7	16
28	Sulawesi Utara	1	1	1	1	2	3	7	16
29	Gorontalo	1	1	1	1	2	3	7	16
30	Maluku	1	1	1	1	2	3	7	16
31	maluku Utara	1	1	1	1	2	3	7	16
32	Papua	1	1	1	1	2	3	3	12
33	Papua Barat	1	1	1	1	2	3	3	12
34	Papua Selatan	1	1	1	1	2	2	3	11
35	Papua Barat Daya	1	1	1	1	2	2	3	11
Total		35	35	35	35	70	143	243	**596**

c. Peserta Workshop antara lain terdiri dari unsur tenaga profesional terkait Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Pusat), TA P3PD, ASN Pusat atau Tenaga Ahli di Kementerian Desa dan PDT TAPM Propinsi, Tenaga Ahli Kementerian Desa, TAPM Kabupaten, Sekretariat P3PD , Kementerian/ Lembaga lainnya, Staf Sub Komponen PIU lainnya/ UKE-1 lainnya;

d. Materi kegiatan adalah materi Kepeloporan Pemuda dalam pemangunan Desa, Arah dan Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Fasilitasi Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Mitigasi dan Adatasi Perubahan iklim di Desa, Membangun Ketahanan pangan di Desa dan Kebijakan pembangunan berkelanjutan

e. Narasumber **7 Orang** berasal dari unsur Peggiat/pemuda (Tokoh Inspiratif) Akademisi, Pegiat Desa, K/L dan Praktisi lainnya;
f. Moderator **3 Orang** (eksternal diluar Kementerian Desa, dan PDT)
g. Output Workshop adalah Jadual Materi, Fasilitator, Mentor dan Narsum kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitasi Pemuda Pelopor Desa ;
h. Kegiatan dilaksanakan 4 hari 3 malam fullboard di Banten

Setelah pelaksanaan workshop Fasilitasi pemuda pelopor desa inkusif dilaksanakan dilanjutkan melakukan mekanisme evaluasi kegiatan paska kegiatan workshop melalui :

a. Penyebaran Instrumen Monitoring Paska Workshop Fasilitasi Pemuda Pelopor melalui Google form atau Tools lainnya
b. Pertemuan melalui Kegiatan Virtual Meeting untuk melakukan evaluasi hasil tindak lanjut workshop.

Selanjutnya setelah kegiatan workshop, maka dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Pembekalan dan Bimbingan Teknis Evaluasi Fasilitasi Pemuda Pelopora di Desa Inklusi dilokasi Kabupaten Pilot. Kegiatan tersebut didukung melalui Surat Edaran Pelaksanaan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Desa Inklusi pada lokasi kabupaten pilot.

2.2. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Fasilitasi Pemuda Pelopor di tingkat Desa Inklusif direncanakan bulan Mei 2025.

2. Kegiatan Konsolidasi 1 (satu) Hari
3. Kegiatan Workshop 4 hari 3 malam

dengan time line kegiatan sebagai berikut:

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF

NO	TAHAPAN	Bulan ke-1			
		MG I	MG II	MG III	MG IV
4	Persiapan Kegiatan				
5	Pelaksanaan Kegiatan				
6	Pelaporan				
7	Pembayaran				

BAGIAN 3 METODE PENGADAAN

3.1. MEKANISME PENGADAAN

Pelaksanaan dan Penanggung jawab kegiatan adalah Pusat PPMDDT dan pengelolaan kegiatan serta pembiayaan akan dilaksanakan melalui pihak ketiga, yaitu Perusahaan Event Organizer (EO). Proses pengadaan pemilihan penyedia Jasa lainnya dengan metode pada procurment in invesment Project Financing (IPF) Goods, Works, an Non- Consulting Services dari World bank (Bank Dunia).

BAGIAN 4PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Spesifikasi Teknis ini akan diatur kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan. Spesifikasi Teknis ini sewaktu-waktu dapat direvisi sesuai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif dimaksud.

Jakarta, Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Andhika Sampurno, SE, MM
NIP. 19900805 201903 1 005

Daftar Belanja Bahan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor di tingkat Desa Inklusif
Tahun Anggaran 2025

NO	BAHAN	VOLUME	SATUAN
I	ALAT TULIS KANTOR		
1.	Amplop (110 x 230)	8	Dus
2.	Stapler Kecil	8	Unit
3.	Binder Clip (51 mm dan 41 mm)	8	Pak
4.	Paper Clip	8	Pak
5.	Kertas A4	1	Rim
6.	Kertas F4	4	Rim
II	Seminar Kit	74	PKT
III	ID Card + Lanyard	74	Pkt
IV	Dokumentasi (Hardisk Eksternal WD My Passport	1	PKT
V	Laporan	3	Exp

Daftar Belanja Jasa Lainnya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemuda Pelopor di tingkat
Desa Inklusif Tahun Anggaran 2025

NO	BAHAN	VOLUME	SATUAN
I	Multimedia/Videotron 1. LED P3.9 (Tengah) 32m^2 2. LED P3.9 (Kanan & Kiri) 24m^2 3. Frame LED (Tengah) 16m^2 4. Frame LED (Kanan & Kiri)12m^2 5. Live Cam Multimedia 4 unit 6. TV Plasma + Standing 4 unit 7. Sound System 2 pkt	1	PKT